#### **BAB II**

#### PERSPEKTIF TEORITIS

#### A. Kajian Konseptual Kepustakaan

#### a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "Empowerment", yang bias diartikan sebagai pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.<sup>8</sup> Pemberdayaan masyarakat adalah erangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat eningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keterberdayaan kelompok lemah yang ada dalam masyarakat, termasuk individu—individu yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 82



memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan dalam mencapai penguat diri untuk meraih keinginan yang dicapai. Pemberdayaan akan melahirkan suatu kemandirian masyarakat, baik kemandirian berfikir, sikap, maupun tindakan yang pada akhirnya mampu memunculkan sebuah kehidupan yang lebih baik.

Definisi lain tentang masyarakat menurut Salim Suradjo adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang memiliki akses ke sumber daya manusia didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan peri kehidupan mereka.

Pada prinsipnya masyarakat mengkaji tentang utama pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Aktivitas ini kemudian menjadi basis program local regional. Bahkan nasional, target utama pendekatan ini adalah kelompok yang termajinalkan dalam masyarakat. Termasuk wanita, namun demikian hal ini mematikan partisipasi dari kelompok lain.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus. Proses partisipasi dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok format maupun non format. Untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 60



usaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses. Ketimbang sebuah pendekatan cetak biru.<sup>10</sup> Adapun menurut Bagyon Suyanto pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.<sup>11</sup>

#### b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

- Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya
- Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola
- 3. *Desentralisasi*. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya
- 4. Berorientasi pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
- Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Moh Ali Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyajarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 136

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Moh Ali Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat.....*, hal. 165

- 6. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut
- 7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin
- 8. *Transparansi dan Akuntabel*. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif
- 9. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- 10. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
- 11. *Keberlanjutan*. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shoppin

saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan<sup>12</sup>

Berdasarkan kajian konsep dasar pengembangan masyarakat yang dilanjutkan dengan merekonstruksi konsep dakwah sebagai bagian dari upaya membangun paradigma baru model dakwah maka dakwah pengembangan masyarakat harus mengikuti beberapa prinsip dasar yaitu:

Pertama, orientasi pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat luas. Dakwah tidak dilaksanakan sekadar merumuskan keinginan sebagian masyarakat saja, tetapi direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial bersama masyarakat agar penindasan, ketidak adilan dan kesewenang-wenangan tidak lagi hidup ditengah- tengah mereka. Skala makro yang menjadi sasaran dakwah bukan berarti meninggalkan skala mikro kepentingan individu anggota masyarakat..

Kedua, dakwah pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah upaya melakukan social engineering (rekayasa sosial)untuk mendapatkan suatu perubahan tatana kehidupan sosial yang lebih baik.

Disamping kedua prinsip dasar tersebut, ada beberapa prinsip yang lain yang harus terpenuhi dalam dakwah pengembangan masyarakat yaitu:

%20Slicing%202009%20%20Apr%2009/-

<sup>12</sup>http://nmc.ppk.or.id/Modul%20Pratugas%20-

PB.2.%20kebijakan/BB.Untuk%20Peserta/Final%20Draft%20Buku%20Saku%20KPMD/i-Cover%-20Bridging.doc. Tgl, 7 februari 2013 jam 03.11 WIB

#### 1. Prinsip Kebutuhan,

Artinya, program dakwah harus didasarkan atas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik materiil dan non materiil.

#### 2. Prinsip Partisipasi

Prinsip dakwah ini menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses dakwah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, penilaian, dan pengembangannya.

# 3. Prinsip Keterpaduan

Mencerminkan adanya upaya untuk memadukan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, bukan monopoli sekelompok orang dan ahli, atau organisasi.

#### 4. Prinsip Berkelanjutan

Prinsip ini menekankan bahwa dakwah itu harus *sustainable*.

Artinya, dakwah harus berkelanjutan yang tidak dibatasi oleh waktu.

#### 5. Prinsip Keserasian

Mengandung makna bahwa program dakwah pengembangan masyarakat harus mepertimbangkan keserasian kebutuhan jasmaniah dan ruhaniah masyarakat.

#### 6. Prinsip Kemampuan Sendiri

Menegaskan bahwa kegiatan dakwah pengembangan masyarakat disusun dan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan sumbersumber (potensi) yang dimiliki masyarakat. Adapun



keterlibatan pihak lain hanyalah bersifat sementara yang berfungsi sebagai fasilitator dan transformasi nilai keagamaan.<sup>13</sup>

#### B. Pengertian Konservasi Lingkungan

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Conservation* yang artinya pelestarian atau perlindungan. <sup>14</sup>

Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah<sup>15</sup>:

- Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya.
- Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam
- Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kiamia atau transformasi fisik.
- Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan
- Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Moh. Ali Aziz, et. al. (ed.). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, hal. 15-88

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Reif, J.A. Levy, Y., *Password: Kamus Bahasa Inggris Untuk Pelajar* (Bekasi: PT. Kesaint Blanc Indah Corp. Bekasi, 1993).

Konservasi, Pengertian Konservasi, http://www.biology-online.org/dictionary/Conservation, diakses tanggal 7 Februari 2013.

Di Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dikatakan pada bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 2<sup>16</sup> bahwa *konservasi* (sumber daya alam hayati) adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).<sup>17</sup>

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersamaan mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari setiap generasi. Tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservsi Sumber Daya Alam HayatiDan Ekosistemnya (Sub balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur 1, Oktober 1996).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Wikipedia, Pengertian Konservasi, http://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi, diakses tanggal 7 Februari 2013.



dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. 18

Taman Nasional mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman hutan raya untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman wisata alam dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. 19

Taman Nasional termasuk kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mengenal Sebagian Satwa Liar yang Dilindungi, *Provek Pengembangan Kawasan* 

Konservasi Sumber Daya Alam (Sub Balai Sumberdaya Alam Jawa Timur I)

Wikipedia, Pengertian Konservasi, http://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi, diakses tanggal 7 Februari 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> UU RI No. 5 Th.1990 pada bab VII Kawasan Pelestarian Alam pasal 30



#### C. Kajian Teoritik

#### a. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bukunya, Edi Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat dapat lebih berani untuk menghadapi kehidupannya, bahkan dia juga mampu mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang dia miliki agar kehidupannya menjadi lebih baik. Pemberdayaan dikhususkan terhadap kelompok masyarakat lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik itu *internal* (karena persepsi dirinya sendiri) ataupun *eksternal* (karena struktur sosial yang tidak adil).

Keadaan berdaya dapat masyarakat peroleh dari dirinya sendiri bukan dari orang lain, karena meskipun pemberdayaan tersebut datang dari orang lain tapi jika dirinya sendiri menolak akan adanya pemberdayaan tersebut atau merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan hal tersebut maka semua hal tersebut akan sia-sia. Maka dari itu pemberdayaan itu ada agar rakyat mampu untuk menguasai dirinya sendiri bukan pihak lain yang menguasainya.

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo dan makro :

\_

 $<sup>^{21}</sup>$  Edi Suharto,  $\it Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, 2006). 59$ 

- Aras Mikro, pemberdayaan pada aras ini dilakukan terhadap klien secara individu yang mana melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention. Dengan tujuan untuk membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
- 2. Aras Mezzo, pemberdayaan pada aras ini dilakukan terhadap sekelompok klien yang mana menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, pengetahuan dan keterampilan merupakan strategi dalam meningkatkan kesadaran dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 3. Aras Makro, aras ini disebut juga sebagai strategi sistem besar karena perubahannya lebih terhadap lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan, kampanye, aksi sosial, dan pengorganisasian masyarakat. Aras ini juga memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasisituasi mereka sendiri, dan juga untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.<sup>22</sup>

Dalam pemberdayaan selain mengarahkan masyarakat untuk berani menguasai diri mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain, tapi kita juga harus mampu untuk membangkitkan keinginan dari masyarakat secara aktif dan juga mampu untuk meneguhkan komitmen

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 66-67



sosial terhadap *stakeholder* agar melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat yang biasa kita sebut dengan sebutan mobilisasi sosial.

Akan tetapi dalam skripsi ini menggunakan Aras Mezzo yaitu sebagai berikut:

• Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.<sup>23</sup>

#### b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa-sedarah dengan aliran yang muncul pada abad ke-20 yang lebih dikenal dengan aliran post-modernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang disuatu negara. Parson menyatakan bahwa konsep power dalam masyarakat adalah variable jumlah atau kekuatan dalam masyarakat secara keseluruhan yang

\_

 $<sup>^{23}</sup>$  Abu Huraerah,  $Pengorganisasian\ dan\ Pengembangan\ Masyarakat,$  (Bandung : Humaniora, 2011). hal 106-107



selanjutnya memiliki tujuan yang kolektif, misalnya dalam pembangunan ekonomi.<sup>24</sup>

Secara umum, ada 4 strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu meliputi :<sup>25</sup>

### 1. The growth strategy

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, sektor pertanian, pemodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.

#### 2. The responsive strategy

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (self need assistance) untuk memperlancar usaha sendiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai dengan kebutuhan proses pembangunan. Tetapi karena pemberdayaan masyarakat (people empowerment) sendiri belum dilakukan, maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit untuk

<sup>25</sup> Moh. Ali Azis, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2005). Hal. 8

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Press, 2006), hal. 1-2

ditransformasikan kepada masyarakat. Satu hal yang perlu diperhatikan kecepatan teknologi seringkali bahkan selalu tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri, akibatnya teknologi yang dipakai dalam penerapan strategi ini menjadi disfungsional.

# 3. *The walfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, tetapi karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultural dan budaya mandiri dalam diri masyarakat, maka yang terjadi adalah tingginya sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Karena itulah dalam setiap usaha pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah persoalan kultur dan budaya masyarakat.

#### 4. *The integrated or holistic strategy*

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena kegagalan ketiga strategi seperti hal di atas, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok ketiga strategi di atas menjadi alternatif terbaik.

Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam



proses pembangunan masyarakat. Karena itulah dalam strategi ini terdapat 3 prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1. Persamaan, keadilan pemerataan dan partisipasi merupakan tujuan yang secara eksplisit harus ada strategi menyeluruh, maka badan publik yang ditugasi untuk melaksanakan harus:
  - a. Memahami dinamika sosial masyarakat sebagai interversinya.
  - Intervensi dilakukan memperoleh b. untuk kemampuan masyarakat sendiri dalam pemecahkan masalah yang dihadapi. Serta untuk mengambil langkah instrumental yang kemampuan melakukan membutuhkan aparatur untuk intervensi sosial
- 2. Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitmen maupun dalam gaya dan cara bekerja, maka badan publik yang belum memiliki kemampuan intervensi sosial akan melakukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya, tercapainya tujuan strategi holistik tersebut, yaitu untuk:
  - a. Menentukan arah nilai organisasi, energi dan proses menuju strategi
  - b. Memelihara integritas organisasi yang didukung oleh "Institusional leadership".
- 3. Keterlibatan badan publik dan organisasi sosial secara terpadu, maka memerlukan suatu pedoman untuk memfungsikan supra organisasi yang berfungsi antara lain:

- a. Membangun dan memelihara perspektif menyeluruh
- b. Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan pimpinan kelembagaan.
- c. Membantu mekanisme kontrol untuk saling mengatur keterkaitan antara organisasi formal dan informal melalui sistem manajemen strategi. Untuk menjaga prinsip tersebut, maka dalam strategi itu diperlukan keterlibatan semua masyarakat yang berkompeten dan bekerja secara profesional sesuai dengan bidang masing-masing.

#### c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut David C. Korten, pembangunan selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal ini merupakan sebuah tahapan yang esensial dan fundamental menuju tercapainya tujuan kesejahteraan manusia. Kebutuhan dasar tidak dilihat dalam batasan-batasan minimum manusia, yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, tetapi juga sebagai kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara fair, serta tentu saja aktualisasi spiritual.<sup>26</sup>

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun kondisi

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara, 2005). Hal. 5



eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja,
   dan penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau dengan keluarga.<sup>27</sup>

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indicator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan cultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (power within), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over), dan kekuasaan dengan (power with). Dalam hal ini ada 8 indikator pemberdayaan.

a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas

-

 $<sup>^{27}</sup>$  Edi Suharto,  $\it Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, 2006). Hal. 60$ 

- medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari atau kebutuhan dirinya. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barangbarang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, radio, pakaian keluarga dan lain-lain.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, memperoleh kredit usaha, dan lain-lain.
- e. Kebebasan relative dan dominan keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja diluar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengertahui nama salah seorang pegawai pemerintah Kelurahan/kelurahan; seorang anggota DPRD

setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan social; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.<sup>28</sup>

#### d. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pendekatan diatas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis, seperti Salomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sulivan dan Kisthardt (1989), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial, diantaranya:

 $<sup>^{28}</sup>$  Edi Suharto,  $\it Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, 2006). 64-66$ 

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaborasi. Karena pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu kepada masyarakat.
- e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

- Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.<sup>29</sup>

#### e. Model-Model Pemberdayaan

Dalam hal ini menurut Jack Rothman dalam klasiknya mengembangkan tiga model yang berbunga dalam memahami konsep tentang pemberdayaan masyarakat diantaranya:

#### a. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri, anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

#### b. Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial disini menunjukkan pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid.* Hal. 68-69



kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk dan lain-lain.

Perencanaan sosial lebih berorientasi pada "tujuan tugas". Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok- kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita tuna susila, para perencana sosial dipandang sebagai ahli (expert) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan.

#### c. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamentalis dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution of resources) dan pengambilan keputusan (distribution of dicisi making) pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering kali menjadi korban ketidakadilan struktur.

Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber- sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses



penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*). 30

# D. Perspektif Ilmu Dakwah pada Pemberdayaan Masyarakat dalam Konservasi Lingkungan hidup

#### 1. Konsepsi ilmu dakwah

Konsepsi dakwah selama ini lebih dipahami sebagai sebuah upaya mengajak diri sendiri atau orang lain untuk berbuat kebajikan (al-ma'ruf) dan mencegah perbuatan jahat (al-munkar). Melihat pemahaman seperti itu, meski secara doktrinal dapat diakui, namun hal itu tampak lebih "mengarah" ke perspektif aksiologi dari pada perspektif ontologi dan epistimologi. Kenyataan itulah yang kemudian memberikan konsekuensi-konsekuensi terhadap penggunaan istilah dan simbol dakwah selama ini, yang untuk sementara "dugaan" telah terjadi kerancuan penggunaan. Karena itu sebuah kajian ulang terhadap konsepsi dakwah perlu dilakuakan, guna mendapatkan konsepsi ilmu dakwah sebenarnya, bagaimana posisinya, dan bagaimana wilayahnya, sehingga kajian ilmu dakwah benar-benar "menghasilkan" dan tidak berbenturan dengan kajian-kajian yang lain. Untuk maksud tersebut, sebuah pendekatan heuristik dalam "meneropong" konsepsi ilmu dakwah adalah langkah pertama kajian. Dengan pendekatan heuristik, kajian dilakukan terhadap berbagai sumber referensi kedakwahan, kemudian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama, 2010). Hal. 37



dirumuskan dan dievaluasi bagaimana konsep ilmu dakwah dalam perspektif ontologi, epistimologi dan aksiologi.<sup>31</sup>

Yang dimaksud "Idealitas Keilmuan Dakwah" di sisni adalah bagaimana seharusnya struktur keilmuan dakwah yang ideal, sedangkan pendekatan "heuristik" dimaksudkan seperti yang dikatakan oleh Van Peursen<sup>32</sup>, suatu usaha pembaharuan terhadap disiplin ilmu baik dalam rangka membina dan mendorong kemajuan suatu disiplin ilmu ataupun usaha menemukan disiplin ilmu baru terkait dengan sejarah penggunaan bahasa yang dipakai oleh disiplin ilmu itu, atau karena perkembangan budaya yang memungkinkan suatu bidang studi tertentu berpisah dengan induk disiplin ilmunya atau bahkan menemukan wilayah kajiannya yang khas. Dengan melihat adanya peluang pada disiplin keilmuan dakwah pada dua dataran heuristik itulah penulis melakukan kajian keilmuan dakwah.<sup>33</sup>

Di satu pihak penulis melihat, bahwa yang dimaksud dengan analisis dakwah adalah suatu gejala dimana terdapat dua orang atau lebih yang salah satu atau sebagian diantaranya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan dalam perspektif ini berarti objek materi dakwah adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah manusia ditinjau dari tingkah lakunya dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Masduqi Affandi, Jurnal Ilmu Dakwah: Konsepsi Tentang Ilmu Dakwah(Sebuah Pendekatan Heuristik) (Surabaya: Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001),

32 C. A. Van Peursen, De Ophouw Van De Wetnschap, ter. J. Drost (Jakarta: Gramedia,

<sup>1980)</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid* ..., 2.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> *Ibid*, 2.

Dari doktrin wahyu penulis mengakui bahwa mengajak diri sendiri untuk melakukan kebaikan dan mencegah perbuatan jahat adalah termasuk dakwah, hanya saja bentuk yang demikian itu lebih ke perspektif aksiologis dibanding perspektif ontologis dan epistimologis. Selain itu penulis juga menemukan fakta tentang kerancuan penggunaan istilah atau simbol yang digunakan dalam mengkaji dakwah, misalnya materi dakwah. 35 dipakai dengan tidak secara konsisten, terkadang ia (materi dakwah, red) digunakan pada nuansa "ilmu pengetahuan", dan terkadang digunakan pada nuansa "seni". Namun demikian, kedua nuansa itu masing-masing menganggap, bahwa "materi dakwah" adalah ajaran islam. Demikian pula terjadi pada penggunaan simbol atau istilah "metode dakwah", juga mengalami tingkat kerancuan yang akut. Abdul Karim Zaidan, menyamakan antara "metodik dakwah" dengan "media dakwah". Abdul Qadir Munsyi<sup>36</sup> memaknai metode dakwah dalam perspektif pelaksanaan dakwah seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, teladan, peragaan, dan metode karya wisata. Sementara Ali Aziz<sup>37</sup> melihat, bahwa metode dakwah adalah metode siklus dan metode linier. Dalam Ankersmit<sup>38</sup> siklus dan linier dianggap sebagai tujuan penulisan sejarah.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Abdul Karim Zaidan, al-Usul al-Da'wah, ter. Asywadi Syukur (Jakarta: Media Dakwah, 1983). Bandingkan dengan syafa'at, Buku Pedoman Dakwah (Jakarta: Wijaya, 1982).juga diperiksa MOh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1992)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Abdul Qadir Munsyi, *Metode Diskusi Dalam Dakwah* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981)

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1992)

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> F. R. Ankersmit, *Denken Over Geishiedenis*, ter. Dic Hatoko (Jakarta: Gramedia, 1987)



Tujuan dakwah dikatakan sebagai terciptanya kebahagiaan dunia akhirat<sup>39</sup>, mengajak manusia berjalan diatas jalan Allah, mengambil jalan Allah sebagai jalan hidupnya<sup>40</sup>, untuk memperbaiki akhlak.<sup>41</sup> Bilamana dakwah dalam perspektif pelaksanaan atau aplikasi beberapa tujuan itu sepenuhnya dapat diterima, tetapi jika yang dimaksudkan adalah keilmuan dakwah, maka harus dibandingkan dengan Jujun S. Suriasumantri<sup>42</sup>, yang mengatakan bahwa tujuan ilmu adalah memahami, menjelaskan atau menerangkan, lalu meramalkan. Dengan demikian, dengan ilmu kita dapat mengontrol atau memanipulasi gejala.

# Hubungan ilmu dakwah dengan pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan

Secara garis besar pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Sedangkan konservasi lingkungan adalah upaya untuk melestarikan lingkungan, maksudnya adalah mengelola dan memanfaatkan lingkungan dengan bijaksana. Jadi pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan adalah segala upaya memandirikan masyarakat untuk melestarikan lingkungan agar masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan lingkungan dengan bijaksana. Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat tentunya diperlukan metode-metode dan media, salah satu upayanya adalah dengan melakukan pendampingan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Aziz, *Ilmu Dakwah*.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> A. Hasymy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Syafa'at Habib, *Buku Pedoman Dakwah* (Jakarta: Wijaya, 1982)

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat IlmuSebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)



Pendampingan dan penyuluhan termasuk dalam dakwah islam atau dapat dikatakan pendampingan dan penyuluhan termasuk metode yang dilakukan dalam menyampaikan pesan dakwah. Ada beberapa metode dakwah seperti berikut ini:

Firman Alloh SWT dalam surat An- Nahl ayat 125:

Artinya: "serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." <sup>43</sup>

Pada ayat diatas menyebutkan tentang menyeru atau mengajak manusia ke jalan yang benar dengan cara yang baik dan jika hendak membantah pendapat orang lain dengan cara yang baik pula. Berikut ini ada beberapa metode dalam penyampaian dakwah yang baik:

#### a. Hikmah

Ibnu Manshur dalam kitab Lisanul Arab berpendapat sebagai berikut

"Hikmah ialah ungkapan tentang pengetahuan sesuatu yang paling utama melalui ilmu-ilmu yang utama.Dinamakan ahli hikmah(seorang arif bijaksana) bagi yang memahami secara bagus dan mahir tentang seluk beluk pekerjaan."

#### b. Dengan Mauidzoh Hasanah

 $<sup>^{\</sup>rm 43}$  Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 41



Masyhur Amin berpendapat mauidzoh hasanah yaitu :

"memberi nasehat dan memberi ingatan kepada orang lain dengan bahasa yang baik yang dapat menggugah hatinya sehingga si pendengar itu dapat menerima apa yang dinasehatkan itu".

#### c. Dengan Mujadalah Yang Sebaik-baiknya

Artinya berda'wah atau pendampingan agama dengan jalan tukar pikiran dengan sebaik-baiknya

Bertitik tolak dari ayat tersebut di atas kiranya dapat di fahami bahwa mengajak atau menyeru manusia ke jalan yang di ridho allah SWT. Harus melalui tiga pedoman yaitu:

- Bijaksana adalah mengetahui secara mendalam tentang kondisi obyek yang dihadapi.
- Pendidikan adalah seperangkat sistem yang digunakan dalam rangka mengalihkan sikap manusia ke arah yang lebih mapan.
- Tukar pikiran dengan beretika yaitu menciptakan suasana dialog yang berbobot untuk menyakinkan manusia sehingga menerima ajaran agama dengan lapang dada dan penuh keyakinan.<sup>44</sup>

Dari penjelasan diatas penyuluhan bisa dikategorikan sebagai dakwah dengan cara mauidzol hasanah, yaitu penyuluhan dengan memberikan nasehat serta peringatan kepada masyarakat tentang manfaat konservasi lingkungan dan permasalahan yang akan timbul akibat ketidak seimbangan ekosistem lingkungan. Sedangkan pendampingan bisa dikategorikan dakwah dengan cara mujadalah yang sebaik-baiknya. Pesan

<sup>44</sup> Masyhur Amin, Ibnu Manshur, dalam Kitab Lisanul Arab, 1980



dakwah yang disampaikan memang ajaran islam, tetapi materi kajian keilmuan dakwah bukanlah semata-mata ajaran islam. Pesan moral yang disampaikan dalam pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan adalah merupakan ajaran islam juga yaitu menyeru manusia agar tidak berbuat kerusakan dan menjaga lingkungan dengan baik. Hanya saja kajian keilmuan yang disampaikan bukan kajian keislaman melainkan kajian tentang alam. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-A'rof ayat 56 yang berbunyi:

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya". (Q.S Al-A'rof: 56)

Dengan demikian, dapat dipahami dengan jelas bahwa kesadaran melestarikan lingkungan, sebagaimana yang dikampanyekan oleh orangorang sekarang ini, dasar-dasarnya telah digariskan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu. Hanya saja, karena keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohannya sendiri, umat Islam seringkali kurang memahami arti dari ayat-ayat dari Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu tugas utama Islam adalah menghapus keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan dari kehidupan umat. 46

Hubungan Manusia dengan Alam, http://konsep-islam.blogspot.com/2011/10/hubungan-manusia-dengan-alam.html, diakses tanggal 7 Februari 2013\

<sup>45</sup> Masduqi Affandi, *Jurnal Ilmu Dakwah: Konsepsi Tentang Ilmu Dakwah(Sebuah Pendekatan Heuristik)* (Surabaya: Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001)..., hal. 7

46 Blogspot Hubungan Manusia dengan Alam http://konseps



#### 3. Perspektif Islam dalam Melihat Lingkungan Hidup

Persoalan lingkungan hidup adalah merupakan salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian cukup serius dari seluruh ummat manusia, sebab ummat manusia mengemban tugas sebagai Kholifah Allah di muka bumi dan sekaligus sebagai pemegang Amanah Allah di muka bumi, sebab manusialah yang bersedia mengemban Amanah Allah seperti tertuang dalam Al-Quran, sebagai berikut :

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (Q.S. Al-Ahzab : 72).

Sebagai kholifah, ummat manusia bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemeliharaan bumi.Bumi bagi ummat manusia adalah merupakan rahmat yang harus disyukuri dengan sepenuh hati. Bentuk syukur atas alam raya ini dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu :

- 1. Memelihara agar tetap lestari.
- 2. Menikmati sebagai bekal dalam hidup dan kehidupan.
- 3. Mengembangkan, dalam bentuk budidaya dan penanaman ulang.

Oleh karena itulah maka dapat dipahami apabila Allah SWT memperingatkan ummat manusia agar jangan membuat kerusakan di muka bumi, sebab kerusakan di bumi pada dasarnya adalah merupakan akibat dari ulah manusia sendiri. Hal ini sesuai dengan firmannya:

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu



dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qashash/28: 77)

#### dan juga firman Allah:

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-Ruum/30: 41)

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan kita agar senantiasa memelihara dan melestariakan lingkungan hidup, sebab kehidupan makhluk-makhluk tuhan dimuka bumi adalah saling terkait dan ketergantungan, apabila terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, maka makhluk yang berada dalam lingkungan hidup tersebut akan ikut terganggu, keserasian dan keseimbangannyapun akan rusak. Apabila ini yang terjadi maka akan mengakibatkan kehancuran dan malapetaka.

Seperti yang dikemukakan pada ayat berikut ini, Allah SWT menciptakan manusia sebagai Khalifah Allah di muka bumi, sesuai dengan firmannya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Q.S. Al-Baqarah/2:30).

Dr. M. Quraish Shihab dalam bukunya membumikan Al-Quran menyatakan bahwa, kekhalifahan mempunyai tiga unsur yang saling kait mengkait, kemudian ditambah unsur keempat yang berada di luar, namun amat sangat menentukan arti kekhalifahan itu sendiri, sesuai konsep Al-Quran, yaitu:

- 1. Manusia, yang dalam hal ini dinamai Khalifah
- Alam raya, yang ditunjuk Allah SWT dalam surat AlBaqarah ayat
   sebagai bumi
- Hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia sebagai tugas kekhalifahan.
- 4. Yang memberi penugasan yaitu Allah SWT. Dalam hal ini yang ditugasi harus memperhatikan kehendak yang menugasinya.

Hubungan antara manusia dengan alam, atau hubungan manusia dengan sesamanya, bukan merupakan hubungan antara penakluk dengan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bumi bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi adalah akibat anugerah Allah SWT.